BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi dan analisis data penelitian dihasilkan beberapa poin kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Kesimpulan terdiri atas kesimpulan umum, kesimpulan khusus dan sejumlah proposisi/dalil, diikuti tiga rumusan implikasi, serta dilengkapi dua belas rekomendasi bagi pemangku kepentingan.

A. Kesimpulan

Secara umum disimpulkan bahwa transformasi pranata *datu-atata* berperan bagi pembentukan kompetensi kewarganegaraan di kalangan masyarakat Bajo, meski tidak selalu linier (searah) pada semua aspek kompetensi. Meski berperan dalam aspek peningkatan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*), namun tidak demikian halnya dengan pengembangan watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Secara khusus, penelitian ini menghasilkan enam point kesimpulan, yakni:

1. Pranata *datu-atata* memiliki empat karakteristik. *Pertama*, terdiri atas dua organisasi pola pemikiran dan tindakan yang berbeda corak dan orientasi. Bagi kalangan bangsawan (*datu*), otoritas kekuasaan dan kepemimpinan di lembaga kemasyarakatan, keagamaan, dan pemerintahan adalah “milik” mereka. Sebaliknya, bagi kalangan bukan bangsawan (*atata*), eksklusifitas kepemimpinan dan kekuasaan bagi kalangan bangsawan (*datu*) tidak patut dipertahankan, mesti direduksi dan ditekan, dan karena itu harus diwujudkan kesetaraan peran dan kedudukan bagi semua lapisan masyarakat. *Kedua*, meliputi empat domain berbeda, yakni kekerabatan, keagamaan, pemerintahan, dan kewarganegaraan. *Ketiga*, mengandung tujuan etis dan tujuan politis. *Keempat*, menegaskan dan mengesankan simbol domisili, simbol imajinasi, dan simbol alamiah (batu karang, batu kapur, pasir dan ombak). Bila batu karang melambangkan pranata *datu-atata* dan sikap kalangan bangsawan tempo dulu, dan batu kapur menegaskan pendirian kalangan bukan bangsawan sejak dulu

hingga kini, maka pasir mencerminkan potret pranata *datu-atata* dan sikap kalangan bangsawan masa kini, dan ombak melambangkan akumulasi kecenderungan transformasi pranata *datu-atata* yang makin lama makin mereduksi kesenjangan peran dan kedudukan kewarganegaraan kalangan bangsawan (*datu*) dengan bukan bangsawan (*atata*) dalam masyarakat.

2. Pranata *datu-atata* menampilkan pola transformasi beragam. Pada domain pemerintahan, keagamaan, dan kewarganegaraan menunjukkan perubahan cenderung lambat, dan sebaliknya relatif cepat pada domain kekerabatan. Perubahan itu terutama dikreasi kalangan bukan bangsawan. Meski demikian, pranata *datu-atata* sulit bertransformasi dalam konteks kekuasaan/kepemimpinan, dan sebaliknya relatif mudah bila di luar ranah itu, apalagi diwarnai tiga arus kekuatan yang saling mempengaruhi. Hegemoni bangsawan (*datu*) atas dasar nilai ideologis-relegius dan historis-kultural, di satu sisi, berbenturan dengan tekanan reduksional komunitas bukan bangsawan (*atata*) berbasis nilai egalitarian, dan legitimasi pendidikan, pengalaman, kecakapan intelektual, sosial dan spiritual atas berbagai peran dan kedudukan dalam masyarakat, di sisi lain. Akibatnya, hegemoni *datu* terus tereduksi sehingga menimbulkan perubahan total di bidang kekerabatan; perubahan parsial, kontradiktif dan ambivalen di bidang keagamaan; perubahan parsial, kontradiktif, ambivalen, dan politis di bidang pemerintahan; serta perubahan kontradiktif, ambivalen, dan ambigu di bidang kewarganegaraan.
3. Terjadi perubahan cara pandang dan implikasi pranata *datu-atata* di kalangan masyarakat Bajo, dari negatif menjadi positif. Perubahan itu ditandai oleh meningkatnya posisi tawar (*bargaining position*) kalangan bukan bangsawan (*atata*), di satu sisi, dan berkurangnya dominasi kalangan bangsawan (*datu*), di sisi lain, baik di bidang keagamaan maupun pemerintahan. Pola hubungan kedua komunitas awalnya merupakan hubungan konfliktual-subordinatif. Meskipun hingga kini masih ada pertentangan di antara keduanya, namun berlangsung “dingin” dan terselubung, tidak muncul dalam bentuk kekerasan fisik secara terbuka, sebagaimana terjadi pada era 1940-an. *Psy-war* berlangsung “di bawah permukaan” sehingga tidak menimbulkan gesekan fisik dan implikasi negatif

Sunarto Amus, 2017

**TRANSFORMASI PRANATA SOSIAL DATU-ATATA DALAM PEMBENTUKAN KOMPETENSI
KEWARGANEGARAAN ETNIK BAJO DI SULAWESI TENGAH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

secara signifikan. Dalam perkembangannya, transformasi pranata *datu-atata* menimbulkan perubahan pola hubungan yang semula bersifat konflikual-subordinatif, kemudian beralih menjadi hubungan konflikual-koordinatif atau konflikual-asosiatif. Koordinasi dan kemitraan yang terus dibangun kedua komunitas lewat berbagai arena “asosiasi”, seperti perluasan anggota paguyuban *pasitabaangang*, perkawinan lintas-komunitas, silih-ganti peran keagamaan, dan penjataan peran pemerintahan secara proporsional makin mereduksi konflik psikologis tersebut. Pola tindakan kewarganegaraan tokoh dan warga masyarakat yang semula cenderung eksklusif, khususnya kalangan bangsawan, kemudian bergeser menjadi kewarganegaraan inklusif. Bagi kalangan bukan bangsawan (*atata*), konflik mereka dengan komunitas bangsawan (*datu*) makin memperkuat dan meneguhkan solidaritas internal, mengintensifkan saluran komunikasi, merangsang kreasi dan inovasi kolektif-kolegial guna mengangkat harkat dan martabat, dan menciptakan aliansi politik dengan komunitas masyarakat tertentu (warga Tondo), terutama saat Pilkada berlangsung.

4. Transformasi pranata *datu-atata* menimbulkan implikasi positif bagi pendidikan dan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*). Di antaranya meningkatkan animo studi ke jenjang pendidikan tinggi, pemahaman hak dan kewajiban warganegara secara proporsional, pentingnya berorganisasi, dan pemahaman demokrasi berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi. Selain itu, merevitalisasi kerangka berpikir dan orientasi kewarganegaraan, meningkatkan pemahaman tata kelola pemerintahan dan keagamaan, urgensi politik berdemokrasi dan kebersamaan, serta pemahaman isu-isu global kewarganegaraan. Bagi masyarakat Bajo, warganegara yang baik (*good citizen*) tercermin lewat kepribadian berakhlak mulia, berkomitmen, konsistensi, berkualifikasi pendidikan memadai, berpengalaman luas serta memiliki hubungan sosial yang baik yang ditandai oleh kecakapan bersosialisasi dan melakukan pendekatan dalam menjalankan tugas dan peran.
5. Transformasi pranata *datu-atata* menstimulasi berkembangnya kecakapan intelektual dan kecakapan partisipasi warganegara. Kedua jenis kecakapan itu terbina melalui praktik *datu-atata*. Di satu sisi, kalangan bukan bangsawan

Sunarto Amus, 2017

TRANSFORMASI PRANATA SOSIAL DATU-ATATA DALAM PEMBENTUKAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN ETNIK BAJO DI SULAWESI TENGAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mampu mengidentifikasi, menilai dan mengkritisi kelemahan praktik-praktik kemasyarakatan, keagamaan, pemerintahan dan kewarganegaraan sehingga mereka memacu diri, mengembangkan kapasitas intelektual melalui peningkatan kualifikasi pendidikan (terutama pendidikan agama) sehingga mampu mempengaruhi, berkomunikasi, bersosialisasi dan bekerjasama dengan kalangan bangsawan (*datu*). Mereka menunjukkan peran dan kedudukan signifikan dalam masyarakat lewat berbagai arena pengabdian, di antaranya bidang pendidikan (kepala sekolah), keagamaan (imam desa, pegawai syara, dan muballig), dan pemerintahan (kepala dusun dan sekretaris desa). Di sisi lain, di samping mulai bersikap toleran, saling percaya dan mau bekerjasama, kalangan bangsawan tetap berupaya mempertahankan dominasi sambil melakukan koreksi internal (*self correction*) atas kekuasaan dan kepemimpinan.

6. Transformasi pranata *datu-atata* tidak serta-merta mampu menumbuhkembangkan karakter kewarganegaraan secara paripurna. Pola relasi, adaptasi dan rivalitas di antara dua kelompok, bangsawan dengan bukan bangsawan, tidak signifikan menstimulasi pembentukan karakter kewarganegaraan. Aktualisasi karakter privat dan publik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara berlangsung parsial dan ambivalen, sebab di samping menunjukkan karakter kewarganegaraan yang baik, juga menyisakan tindakan kurang terpuji. Tokoh masyarakat sebagai figur teladan tidak konsisten menampilkan diri sebagai sosok warganegara yang baik (*good citizen*). Revolusi mental kewarganegaraan setengah hati, kekerasan fisik, pelanggaran norma agama dan kesusilaan, serta manajemen pemerintahan kurang akomodatif, transparan dan akuntabel merupakan sederet peristiwa yang tidak kondusif dan adaptif bagi pembudayaan dan pelebagaan karakter kewarganegaraan. Karena itu, diperlukan sinergi institusional, kultural, dan edukatif (situs kuratif) bagi pembinaan karakter warganegara.

Mengacu pada kesimpulan tersebut dihasilkan sejumlah proposisi/dalil, yakni:

1. Pranata *datu-atata* menjadi stimulan bagi pertumbuhan akar budaya demokrasi, seleksi kepemimpinan, dan alokasi sumberdaya.

2. Makin transformatif pranata *datu-atata*, makin efektif rivalitas masyarakat bagi perubahan dan revitalisasi corak kewarganegaraan, dari eksklusif ke inklusif.
3. Transformasi pranata *datu-atata* berlangsung di antara dua sumbu sentrifugal relasi kewarganegaraan, yakni tarikan idealisme dan kepentingan pragmatisme sehingga menghambat pembinaan karakter warganegara.
4. Makin tinggi sinergi institusional, kultural dan edukatif bersama pemerintah daerah, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga persekolahan, makin akseleratif dan efektif peran pranata *datu-atata* bagi pemutuan PKn (*community civic*) dan pembentukan warganegara yang baik.
5. Transformasi pranata *datu-atata* merefleksikan pola relasi dan rivalitas masyarakat secara antagonistik: antara mengusung nilai-nilai humanitas, melanggengkan stratifikasi sosial, dan mereduksi privilege komunitas.
6. Jatidiri dan kearifan lokal etnik Bajo akan hilang akibat erosi kultural, dinamika ekologis, dan transformasi sosial bila tidak diikuti perubahan *mindset*.
7. Makin tinggi pendidikan dan peradaban masyarakat, makin transformatif pranata *datu-atata* di bidang kewarganegaraan, keagamaan dan pemerintahan.

B. Implikasi

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang dihasilkan terdapat sejumlah implikasi yang patut menjadi catatan penelitian, yaitu:

1. Eksistensi pranata *datu-atata* dipengaruhi oleh kondisi internal masyarakat yang melingkupinya, baik yang bersifat alamiah maupun sosial, dan sangat tergantung dari konfigurasi lingkungan eksternal di bidang sosial budaya, politik, dan ekonomi secara nasional, regional dan global, termasuk di dalamnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin pesat. Dinamika masyarakat global di berbagai sektor kehidupan menjadi magnet yang turut mengkondisikan berlangsungnya transformasi pranata *datu-atata* lebih cepat dari yang diharapkan dan dibayangkan. Hegemoni liberalisme dan tuntutan pemenuhan hak asasi manusia sebagai ciri masyarakat global kontemporer, dimana kita menjadi bagian di dalamnya, mampu mereduksi pranata *datu-atata* secara cepat, sebab dominasi dan strukturasi berbasis geneologis dan klaim

- ideologis kelompok mayoritas, terlindas oleh penguatan arus kompetensi dan profesionalisme dalam perebutan kekuasaan dan kepemimpinan di masyarakat.
2. Transformasi pranata *datu-atata* sangat potensial menimbulkan terjadinya peralihan peran dan kedudukan di masyarakat, dari kalangan bangsawan (*datu*) beralih ke tangan kalangan bukan bangsawan (*atata*). Meski kuantitasnya jauh lebih sedikit, namun secara berangsur-angsur menampilkan kualitas yang lebih baik lewat tokoh-tokoh muda yang tampak “berbeda” dengan kebanyakan warga bangsawan, terutama di bidang keagamaan. Hal ini sangat dimungkinkan karena ada stimulan, komitmen dan gerakan kolektif-kolegial untuk memajukan kelompok guna menyaingi bahkan mematahkan dominasi kalangan bangsawan. Apalagi gerakan serupa tidak dimiliki komunitas bangsawan. Meskipun sebagian tokoh bangsawan mengkhawatirkan hal itu, namun tidak menunjukkan adanya gerakan dan “perlombaan” yang bersifat sistemik, lebih menyerahkan pada kehendak alam (*sunnatullah*) tanpa kreasi dan inovasi terorganisir. Suatu ketika kalangan bukan bangsawan (*atata*) akan menjadi “*datu*” di masyarakat, melepaskan predikat ke-*atata*-annya setelah sekian lama ter subordinasi oleh struktur kekuasaan yang menekan dan akibat tafsir subyektif kelompok yang menggunakan pendekatan keagamaan secara sempit.
 3. Transformasi pranata *datu-atata* efektif bagi pembentukan pengetahuan dan kecakapan kewarganegaraan, namun sebaliknya, disfungsi bagi pembentukan dan pembinaan karakter (watak) kewarganegaraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan pada domain pengetahuan/fikir (*knowledge*) dan kecakapan (*skill*) tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan dimensi karakter/akhlak (*disposition*). Pembentukan akhlak kewarganegaraan bukan pekerjaan yang mudah diwujudkan, memiliki tantangan berat seiring berlangsungnya pola hidup hedonisme dan konsumerisme di era keterbukaan dan penuh kebebasan. Karena itu, menurunnya kualitas moral bangsa Indonesia, yang terindikasi lewat maraknya plagiasi, peredaran narkoba dan obat-obat terlarang, meningkatnya kekerasan seksual dan pembunuhan, menyebarnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) hingga ke setiap daerah dan struktur kekuasaan, menunjukkan bahwa penyelenggaraan

Sunarto Amus, 2017

**TRANSFORMASI PRANATA SOSIAL DATU-ATATA DALAM PEMBENTUKAN KOMPETENSI
KEWARGANEGARAAN ETNIK BAJO DI SULAWESI TENGAH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendidikan pada umumnya, dan PKn pada khususnya, sebagai sektor terdepan (*leading sector*) pembentukan dan pembinaan akhlak bangsa, patut dievaluasi dan direvitalisasi secara sistemik dan berkelanjutan, bukan pada tataran konsepsional seperti yang terjadi selama ini, akan tetapi pada wilayah implementasi atau operasional. Dalam kaitan ini, peran segenap *stakeholder* pendidikan, termasuk di dalamnya Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) menjadi sangat penting dan strategis guna mencari terobosan inovatif secara bersama-sama dan terintegrasi dalam “proyek besar” pembenahan akhlak bangsa, terutama kalangan generasi muda.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian, dikemukakan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, masyarakat Bajo, lembaga pendidikan dan para peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

- a. Potensi persaingan yang secara alamiah tumbuh dan terbina di antara segenap komponen masyarakat Bajo akibat eksistensi pranata *datu-atata* hendaknya dimanfaatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai modal sosial (*social capital*) guna menyukseskan program-program pembangunan yang digulirkan lewat bantuan dana desa. Lebih dari itu, bantuan dana desa hendaknya diarahkan dan dimanfaatkan bukan hanya terbatas pada dan/atau mengutamakan program fisik, tapi mendukung program penggalian dan pengembangan potensi sosial budaya masyarakat sebagai sumber kekuatan penggerak dan pengendali (*driving force*) pembangunan yang tidak kentara.
- b. Pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemerintah kecamatan dan desa, hendaknya memfasilitasi dan menggali tumbuhnya kreasi warga masyarakat Bajo dengan memanfaatkan rivalitas di antara dua kelompok, bangsawan (*datu*) dengan bukan bangsawan (*atata*), guna menghasilkan langkah-langkah kreatif dan inovatif ke arah pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Cara ini efektif mengkreasi program-program pembangunan masyarakat desa yang

berasal dari, dikendalikan oleh, dan dirasakan efektifitas kemanfaatannya bagi warga masyarakat.

- c. Dinas Pendidikan di daerah hendaknya memanfaatkan potensi persaingan itu sebagai wahana kaderisasi dan pemutuan lembaga pendidikan, dimana masyarakat Bajo terlibat di dalamnya. Hal itu dilakukan lewat promosi jabatan secara kompetitif, misalnya kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan, kepala unit pelaksana teknis pendidikan, atau mengintensifkan dan memberikan *reward* secara memadai kepada komunitas pendidikan lewat kompetisi dan seleksi guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, tenaga administrasi berprestasi, dan siswa berprestasi, sehingga menimbulkan dinamika dan iklim kompetisi yang sehat dan produktif.

2. Bagi Masyarakat Bajo

- a. Untuk memfasilitasi tumbuh dan terbinanya karakter kewarganegaraan yang baik, perlu dibuat rambu-rambu tata kelola penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan, keagamaan dan pemerintahan secara bersama-sama di antara seluruh komponen masyarakat agar bisa diterima dan dipatuhi dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Selain itu, perlu dilakukan langkah-langkah atau gerakan *situs kuratif* secara integratif dan simultan, berupa *sinergi institusional* bersama pemerintah daerah (Bakesbangpol, Kemenag dan parpol), *sinergi kultural* bersama ormas dan organisasi kepemudaan, serta *sinergi edukatif* bersama lembaga pendidikan dasar dan menengah.
- b. Kekuasaan dan kepemimpinan dalam masyarakat mesti didasarkan pada kadar kecakapan, profesionalitas, dan integritas, bukan pada tradisi dan strukturasi yang timbul akibat tafsir subyektif kelompok tertentu. Klaim superioritas dan kepemimpinan berdasarkan garis keturunan dan komunalitas secara sempit hendaknya ditanggalkan dan dialihorientasikan pada pemenuhan kompetensi, kapabilitas, dan integritas warganegara, sehingga kekuasaan dan kewenangan dapat didayagunakan secara optimal bagi kepentingan semua komponen masyarakat.
- c. Tokoh masyarakat hendaknya konsisten menampilkan tindakan-tindakan kewarganegaraan, berintegritas, dan menunjukkan keteladanan sehingga

Sunarto Amus, 2017

TRANSFORMASI PRANATA SOSIAL DATU-ATATA DALAM PEMBENTUKAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN ETNIK BAJO DI SULAWESI TENGAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dapat menginspirasi, menstimulasi dan mengkondisikan tumbuh dan berkembangnya sikap dan perilaku terpuji warga masyarakat. Sisi positif pranata *datu-atata* mesti didayagunakan secara optimal, dan aspek negatifnya direduksi lewat prakarsa tokoh masyarakat secara kolegal. Komunikasi, koordinasi, dan kerjasama lintas tokoh dan warga masyarakat mesti ditingkatkan secara total dan kontinu, bukan parsial dan insidental agar efektif menyelesaikan masalah dan menguntungkan semua pihak, tanpa ada yang merasa dikorbankan. Untuk itu, dibutuhkan tokoh sentral yang proaktif dan inovatif menggalang, menggerakkan, mengembangkan, dan membudayakan sikap dan perilaku berintegritas dan penuh dedikasi.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

- a. Lembaga pendidikan tinggi secara umum hendaknya berinovasi mengembangkan program-program keterlibatan warganegara (*civic engagement*) secara sistemik dengan cara membangun kemitraan bersama masyarakat sehingga eksistensinya benar-benar “membumi” sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) guna memberdayakan masyarakat. Kolaborasi civitas akademika bersama elemen masyarakat mesti ditingkatkan dengan mendayagunakan pranata-pranata sosial sehingga menghasilkan langkah-langkah inovatif lewat implementasi program *civic engagement*.
- b. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) hendaknya mendorong dan memfasilitasi pengembangan kecakapan mahasiswa selaku warganegara muda lewat penggalian kekayaan budaya bangsa dan pranata sosial sebagai sumber nilai pendidikan dan pembelajaran (*etnopedagogik*). Mahasiswa calon guru hendaknya dilatih dan ditingkatkan kemampuan dan ketrampilannya mengeksplorasi dan memanfaatkan kekayaan pranata sosial masyarakat Indonesia sebagai medium dan obyek pembelajaran agar memiliki kesiapan dini yang handal dalam menjalankan pengabdian mereka dalam masyarakat di masa depan.
- c. Disiplin ilmu PKn sangat kaya sumber belajar di masyarakat. Pranata-pranata sosial merupakan bagian dari laboratorium demokrasi yang sangat besar manfaatnya bagi pembelajaran PKn. Karena itu, para Dosen dan Guru

Sunarto Amus, 2017

TRANSFORMASI PRANATA SOSIAL DATU-ATATA DALAM PEMBENTUKAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN ETNIK BAJO DI SULAWESI TENGAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

hendaknya mendayagunakannya secara optimal agar atmosfer pembelajaran PKn di kampus dan/atau di sekolah lebih bermakna (*meaningfull*) dan akseleratif bagi pemantapan intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik, mampu menghadirkan masyarakat di kelas, melatih dan membiasakan mereka belajar memahami, mengkritisi dan memberikan solusi atas berbagai problem sosial kemasyarakatan dan kenegaraan. Dengan demikian, mereka secara sistemik dan programatik memperkenalkan keanekaragaman pranata sosial masyarakat Indonesia kepada subyek didik untuk selanjutnya menjadi sumber nilai dan pemer kaya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

4. Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini baru sampai pada tahap eksplorasi dan ekplanasi nilai-nilai sosial-kultural di balik pranata *datu-atata* etnik Bajo sebagai sumber edukasi pembentukan warganegara yang cerdas dan baik, belum menjangkau implementasinya secara programatik sebagai sumber belajar PKn di sekolah dan/atau di kampus. Karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk menggali bagaimana kontribusi dan efektifitas nilai-nilai sosial-kultural pranata *datu-atata* dalam pembelajaran PKn di sekolah (kampus) bagi pembentukan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan subyek didik.
- b. Penelitian ini makin membuka cakrawala dan kesadaran berpikir peneliti bahwa disiplin ilmu PKn tidak semata-mata tercakup dalam lingkup pendidikan formal di sekolah (*school civic*), akan tetapi meliputi domain sosial-kemasyarakatan. Selain itu, keragaman etnik masyarakat Indonesia yang luar biasa tentu menyimpan kekayaan potensi sosial-kultural sebagai arena belajar dan obyek garapan *community civic*. Karena itu, kekayaan budaya dan pranata sosial etnik-etnik lain di Indonesia patut digali sehingga turut memperkaya konfigurasi cakrawala kewarganegaraan.
- c. Penelitian ini turut menginspirasi bahwa domain *community civic* cukup luas, dalam arti meliputi banyak aspek, bukan hanya terbatas pada lingkup pranata sosial semata. Apalagi masih banyak obyek garapan PKn lainnya, seperti isu-isu lembaga kepemudaan, LSM, ormas, orsospol, pranata legislasi dan birokrasi, komunitas wartawan, nelayan, petani dan lain-lain. Karena itu,

Sunarto Amus, 2017

TRANSFORMASI PRANATA SOSIAL DATU-ATATA DALAM PEMBENTUKAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN ETNIK BAJO DI SULAWESI TENGAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

multiobjek garapan PKn tersebut perlu digali, sebagai bagian dari *community civic*, guna melakukan pembinaan pengetahuan, kecakapan dan kebajikan warganegara bagi mereka, di satu sisi, dan memperkokoh batang tubuh keilmuan (*body of knowledge*) PKn sebagai disiplin ilmu terintegrasi, di sisi lain. Posisi keilmuan PKn bukan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan semata, tapi memberikan “sedekah” empirik bagi akselerasi pembentukan warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).